



TAJUK

Tindak Tegas Kecurangan PPDB, Setop Mengajarkan Ketidakhujuran pada Anak

Ratusan kecurangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DIY pada 2023 dapat digagalkan. Kecurangan PPDB yang dapat digagalkan itu sebanyak 300-an pendaftar di tingkat SMA/SMK.

Hal itu diutarakan oleh Ombudman Republik Indonesia (ORI) DIY saat acara ekspos hasil pemantauan dan kajian ORI DIY terhadap pelaksanaan PPDB di DIY pada 2023.

Secara keseluruhan, ORI DIY menyebut ada 91 aduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan PPDB selama 2023 ini.

Aduan tersebut ada di setiap jalur PPDB dari afirmasi, jalur zonasi, hingga perpindahan

orang tua. Di jalur afirmasi ada manipulasi status kemiskinan, sehingga dapat melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi.

Sementara di jalur perpindahan orang tua ditemukan adanya perjkokian wali murid. ORI DIY menemukan perjkokian wali, perpindahan instansi dengan dua wilayah kerja, mutasi antarbidang dan mutasi masuk DIY. Adapun, khusus pengagagalan kecurangan PPDB, ORI DIY mengatakan hal tersebut dilakukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY.

Modus kecurangan PPDB yang digagalkan Disdikpora DIY itu dengan menumpang alamat dan kartu keluarga kepada kerabat

terdekat dengan sekolah yang didaftar. Cara penggagalan kecurangan PPDB itu dilakukan dengan tidak memproses siswa pendaftar yang alamat dan kartu keluarganya tercatat sebagai famili lain.

Modus tersebut tentu merusak mental peserta didik, terutama terkait dengan kejujuran dan sportivitas. Itulah sebabnya, rekomendasi dari ORI DIY yang meminta agar aturan PPDB tidak menoleransi dan memproses pendaftar yang menumpang KK harus segera direalisasikan, baik itu pelaksana PPDB di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota.

Sementara di wilayah Kota Jogja, Disdikpora Kota Jogja mengaku akan meninjau ulang aturan ihwal PPDB. Peninjauan ini akan dilakukan Disdikpora Kota Jogja untuk memberikan rasa nyaman dan transparan kepada masyarakat luas.

Komitmen ini perlu diapresiasi. Persoalannya, sejauh mana hasil peninjauan ulang itu dilakukan oleh Disdikpora Kota Jogja. Pasalnya, jika mencermati usulan dan rekomendasi ORI DIY, khususnya terkait dengan kecurangan peserta PPDB yang menumpang atau titip KK ke famili lain, sebenarnya, hal yang harus dilakukan oleh pemerintah cukup mudah.

Jika data identitas dan domisili pendaftar PPDB tak sesuai dengan KK, maka pemerintah

tak perlu menoleransi dan harus mencoretnya. Selain itu, untuk menjaga agar pelaksanaan PPDB tetap sesuai dengan aturan, masyarakat juga jangan abai.

Jika menemukan ada pelanggaran, masyarakat harus melaporkannya ke posko aduan yang tersedia, baik itu yang disediakan oleh Pemda DIY maupun pemkab dan pemkot. Pada intinya, jangan sampai PPDB yang seharusnya menjadi momentum mencari tempat tepat untuk bersekolah, justru mendorong orang tua mengajarkan perilaku tak jujur kepada anak. Ingat, perilaku tidak jujur yang dipupuk dari kecil adalah benih korupsi di masa depan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005